



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI SISWANDI**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **981125**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.030.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
4. Tanah Seluas 1.835 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/43 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **113.300.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS TX Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA KIRANA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 800.000



4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
11.000.000
5. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 306.006.044

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 160.202.794

F. HARTA LAINNYA Rp. 85.500.000

Sub Total Rp. 2.695.008.838

III. HUTANG Rp. 136.299.711

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.558.709.127

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.